

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teoretis

Teori dalam disiplin ilmu sejarah biasa disebut sebagai skema pemikiran. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang ada. Definisi teori seperti yang diungkapkan dalam buku Soegiono, yaitu:

Teori adalah seperangkat proporsi yang berfungsi sebagai wahana untuk fenomena yang diteliti, mengidentifikasi masalah yang diteliti, menyusun kategori-kategori untuk mengorganisasi hipotesis-hipotesis yang melalui interpretasi data dapat di uji, memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. (Soegiono 2013:295)

Definisi teori secara luas diungkapkan dalam buku Abdurahman yang menyatakan bahwa “teori adalah suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam menyusun bahan bahan (data) yang diperolehnya dari analisis sumber dan juga dalam mengevaluasi hasil penemuannya” (Abdurahman 2007:32).

Kedua definisi tersebut dipertegas oleh Kerlinger (Creswell, 2003: 120) mengartikan teori sebagai seperangkat ide, konstruk atau variabel, definisi, dan proposisi yang memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dengan cara menentukan hubungan antar-variabel.

Teori memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam penyusunan penelitian melalui teori seorang peneliti mendapat inspirasi untuk bisa memahami dan memaknai suatu persoalan, selain itu teori dipakai sebagai informasi pembanding atau tambahan untuk melihat permasalahan yang akan diteliti secara lebih utuh dan mendalam.

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembahasan konsep. Ada tiga hal yang dijadikan landasan teori penulisan penelitian diantaranya teori peran, teori konflik dan teori bahan ajar. Tiga hal tersebut dijadikan sebagai landasan teori untuk menjelaskan lebih jauh mengenai konsep teori dalam penulisan penelitian.

1. Teori Peranan (Role)

“Konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup pada zaman Yunani kuno. Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti membawa suatu status sosial dalam masyarakat.(Soehardono,1994:3)

Menurut Boediono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran didefinisikan “sebagai sesuatu yang jadi bagian atau memegang atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal dan peristiwa.” (Boediono, 2005:277)

Definisi lain dijelaskan dalam buku Usman “Peran adalah sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat.” (Sunyoto 2012:60)

Kesimpulan dari ketiga pengertian tersebut, peran dapat didefinisikan sebagai fungsi yang dibawakan oleh suatu individu, kelompok dan organisasi yang ikut andil dalam suatu peristiwa yang dianggap penting oleh banyak pihak sehingga individu, kelompok dan organisasi tersebut dapat

diidentifikasi. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang dibentuk oleh pola-pola pergaulan hidup dan sikap individu atau kelompok untuk menghadapi berbagai situasi tertentu. “Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya oleh masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya” (Soekanto, 2012:213)

Individu atau kelompok dalam teori peran tidak hanya sekedar membuat kesempatan dalam melakukan tindakan, tetapi bagaimana cara kontak dan komunikasi efektif yang semestinya dilakukan. Menzies dalam buku Usman menyebutkan tiga langkah yang harus dilakukan untuk membuat analisis dengan berlandaskan pada teori peran, yaitu

(1) mengidentifikasi berbagai harapan yang sangat penting berkaitan dengan topik yang hendak dikaji, (2) memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat disosialisasi kedalam harapan-harapan tersebut dan bagaimana mereka membangun *a self-conception*, dan (3) mendiskusikan tindakan yang muncul dari harapan tersebut, dengan asumsi yang melingkupi secara internal tidak berubah, (Usman, Sunyoto 2012:61)

Peranan menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Dapat dikatakan bahwa setiap seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat dan menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2012:213)

Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas tertentu pada individu atau kelompok yang dapat menjalankan peranan. Fasilitas tersebut salah satunya dapat diperoleh dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai penunjang individu atau kelompok untuk dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai sosial.

2. Teori Konflik

a. Definisi Konflik

Konflik merupakan suatu pertentangan antara individu dengan individu lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain dengan berbagai alasan seperti perbedaan pandangan politik, perbedaan kepentingan ekonomi, dan perbedaan ideologi. Dalam Jurnal yang berjudul *Conflict Theory* definisi konflik ditulis sebagai berikut “*Conflict, from Latin conflagere ,can be understood as shock, clash, collision...*” (Galtung 2008:391).

Bentrokan dan gesekan yang terjadi biasanya mengarah pada sesuatu yang lebih ekstrem seperti pembunuhan, peperangan, eksploitasi yang dilakukan oleh kelas, dominasi wilayah, dan genosida terhadap ras atau etnis tertentu yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik

Secara Sosiologis konflik juga didefinisikan sebagai “sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan

menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.” (Muswapi, 2014:46)

Berdasarkan pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik diartikan sebagai suatu bentrokan (*clash*) yang bisa mengarahkan seseorang untuk melakukan penahanan, pengusiran, pembunuhan dan bahkan eksploitasi terhadap individu maupun kelompok.

Konflik menurut Tuner memiliki makna yang berbeda. Satu sisi ia mengeksploitasi kelas sosial tertentu di bawah situasi yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi dengan eksistensinya yang senantiasa menimbulkan kepentingan tertentu dan pada saat yang lain ia menciptakan revolusi dalam wilayah organisasi politik dengan orientasi melawan kelompok dominan dan pemilik modal dalam struktur kelas yang berjalan. (Mas’udi, 2015:182)

b. Dasar-dasar Teori Konflik

Teori konflik mengatakan bahwa perubahan pola kehidupan tidak terjadi akibat adanya penyesuaian nilai-nilai yang ada didalam masyarakat tetapi akibat dari konflik yang menghasilkan kesepakatan yang berbeda. Teori Konflik yang terkenal diungkapkan oleh Karl Marx mengenai Teori Kelas.

Berkembangnya kapitalisme menyebabkan adanya kesenjangan sosial antara kaum borjuis yang memiliki mesin produksi dengan kaum proletar atau buruh, hal tersebut menimbulkan konflik antar kelas yang berbeda. Eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum

ploretar akhirnya memunculkan kesadaran bagi kaum buruh untuk melawan yang menimbulkan perubahan sosial.

Selain Karl Marx, tokoh lain yang mengemukakan teori konflik adalah Ralf Dahrendorf. Teori konflik Ralf Dahrendorf lebih fokus kepada pertentangan untuk memperebutkan dominasi didalam kehidupan masyarakat, teori konflik menurut sebagai Ralf Dahrendorf berikut:

...masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima atau diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakan "*Imperatively coordinated associations*" (asosiasi yang dikoordinasi secara paksa) karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial. (Rosana, 2015:219)

Hal tersebut menurut Dahrendorf menimbulkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pokok-pokok pikiran atau asumsi-asumsi pokok teori konflik Dahrendorf dalam buku pengantar sosiologi adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan; perubahan ada dimana-mana;
 - (2) Disensus dan konflik terdapat dimana-mana
 - (3) Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat; dan
 - (4) Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain.
- (Sunarto, 2004:218)

Teori Konflik menganggap bahwa perubahan sosial terjadi adanya konflik-konflik kepentingan, maka didalam suatu konflik sering terjadi negosiasi-negosiasi yang menciptakan konsensus, bukan tidak mungkin

bahwa pada titik tertentu masyarakat mencapai kesepakatan bersama. Konflik memiliki paradigma konvensional dan paradigma kontemporer yaitu:

Paradigma Konvensional :

1. Konflik tidak dapat dihindarkan
2. Konflik disebabkan oleh kesalahan manajemen atau penguasa
3. Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaannya secara optimal
4. Tugas manajemen atau pemimpin adalah menghilangkan konflik
5. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik

Paradigma Kontemporer :

1. Konflik dapat dihindarkan
2. Konflik disebabkan oleh banyak sebab termasuk karena struktur organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, nilai-nilai pribadi, dan sebagainya.
3. Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan organisasi (masyarakat) dalam berbagai derajat.
4. Tugas manajemen pemimpin adalah mengelola tingkat dari konflik dan penyelesaiannya
5. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat.

(Rosana, 2015:224)

c. Jenis-jenis Konflik

Konflik memiliki beberapa jenis bila dilihat dari beberapa aspek yang berbeda, menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel dalam Wirawan (2010:22) menyebutkan ada 5 Jenis konflik yaitu: a) Konflik intrapersonal, yaitu konflik seseorang dengan dirinya sendiri biasanya diakibatkan oleh ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam sekaligus. b) Konflik Interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. c) Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok d) Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama seperti konflik antar staf dalam sebuah

perusahaan, konflik antar pekerja dalam pabrik. e) Konflik antar organisasi dikarenakan adanya persaingan diberbagai sektor seperti militer, ekonomi, politik dan perbedaan kebudayaan.

d. Penyebab Konflik

Konflik biasa terjadi karena adanya pertikaian dari beberapa pihak yang tidak merasa puas terhadap apa yang didapat sehingga muncul adanya upaya penghapusan keberadaan pihak lain. Selain itu konflik adalah kondisi dimana ketidakpercayaan individu atau kelompok berkembang dimasyarakat.

Banyak teori yang menyebutkan sebab-sebab terjadinya konflik yang terjadi di masyarakat. Salah satunya menurut Fisher dalam buku Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk bertindak, menuliskan bahwa konflik disebabkan beberapa hal berikut:

Pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. *Kedua*, teori negosiasi konflik. Teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. *Ketiga*, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan social) yang tidak terpenuhi atau terhalangi. *Keempat*, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak selesai. *Kelima*, teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi antarberbagai budaya yang berbeda. *Keenam*, teori transformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah social, budaya, dan ekonomi. (Fisher, 2000:4)

e. Penyelesaian Konflik

Terdapat beberapa cara untuk mencapai penyelesaian atau perdamaian terhadap konflik sosial yang terjadi. Stevenin dalam Handoko (2001:4) menyatakan terdapat lima langkah dalam mengatasi atau menyelesaikan konflik yaitu: a) Pengenalan yaitu mengetahui akar dari permasalahan diantara pihak yang terlibat konflik, b) Diagnosis yaitu tahapan lebih lanjut dari proses pengenalan, dimana pihak yang terlibat menguji kebenaran siapa, apa, mengapa, dimana dan bagaimana konflik tersebut terjadi, c) Menepakati suatu solusi, artinya setiap pihak yang terlibat bersedia menepakati suatu solusi dalam menyelesaikan konflik, d) Pelaksanaan, setelah menepakati suatu solusi, pelaksanaan penyelesaian direalisasikan dengan sebaik mungkin, e) Evaluasi, jika tahapan pelaksanaan tersebut tidak berhasil, pihak yang terlibat konflik dapat mengevaluasi dan mencoba langkah-langkah penyelesaian kembali.

3. Terbentuknya Organisasi Militer di Jawa Barat

Sidang ketiga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan tiga butir keputusan yaitu, pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat.

Badan Keamanan Rakyat merupakan serdadu yang dibentuk pasca kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) tidak dimaksudkan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan asing, tetapi untuk menjaga keselamatan masyarakat sebagai bagian dari BPKKP (Badan

Penolong Keluarga Korban Perang) dan bukan tentara. Badan Penolong Keluarga Korban Perang tersebut didirikan pada tanggal 20 Agustus 1945.

Kondisi Indonesia yang masih belum stabil membuat Presiden Republik Indonesia membentuk suatu badan ketentaraan nasional bernama Tentara Keamanan Rakyat berdasarkan maklumat pemerintah yang dikeluarkan tanggal 05 Oktober 1945.

MAKLUMAT PEMERINTAH

Untuk memperkuat perasaan kemananan umum maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat.

Jakarta, 05 Oktober 1945,
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
SUKARNO

Tentara Keamanan Rakyat terdiri dari rakyat Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia untuk menjaga kehormatan negara Republik Indonesia. Anggota Tentara Keamanan Rakyat didominasi oleh bekas prajurit PETA, Prajurit Hindia-Belanda, Heiho, Kaigun, Barusan Pemuda, Hizbullah, Pelopor dan bekas anggota badan organisasi lain.

Pada tanggal 20 Oktober 1945, oleh Kementrian Keamanan Rakyat diumumkan sebagai berikut:

Telah diangkat oleh Pemerintah Indonesia Pucuk Pimpinan Kementrian Keamanan Rakyat, ialah sebagai berikut:

1. Menteri ad Interim: Muhammad Sulyaadi kusumo
 2. Pemimpin Tertinggi: Supriyadi
 3. Kepala Staf Umum: Mayor Urip Sumoharjo
- Sikap bekas opsir-opsir tentara Hindia Belanda di belakang pemerintah Republik Indonesia. (Nasution, 1977:211)

Letnan Jenderal Urip Sumoharjo kemudian membentuk Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat yang berkedudukan di Yogyakarta. Buku Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI menjelaskan sebagai berikut: “Ia memilih kota Yogyakarta sebagai kedudukan Markas Tertinggi (MT) TKR, mula-mula di salah satu ruangan hotel yang sekarang bernama Hotel Garuda dan kemudian pindah ke gedung yang sekarang menjadi Museum TNI Angkatan darat.” (Notosusanto, 1985:41)

Pada perkembangannya, Tentara Keamanan Rakyat meliputi bagian darat, laut dan udara. Tentara Keamanan Rakyat tersebut kemudian dibagi dalam Komandemen-komandemen yang didalamnya terdapat beberapa Divisi. Di bentuknya Tentara Keamanan Rakyat mengakhiri keberadaan Badan Keamanan Rakyat yang sebelumnya berdiri.

Pemerintah Indonesia tidak menyatakan semua badan bersenjata atau laskar-laskar perjuangan yang ada masuk kedalam Tentara Keamanan Rakyat, Pemerintah saat itu memperbolehkan berdirinya laskar-laskar rakyat yang biasanya dibentuk oleh partai-partai politik.

Staf Markas TKR pada akhirnya membuat maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 1945 yang ditandatangani oleh Kepala staf Umum Urip Sumoharjo yang secara garis besar menyatakan pendirian TKR bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Republik Indonesia, Laskar Rakyat tetap menjadi organisasi-organisasi Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat tidak akan mencampuri pemilihan pimpinan

segala aturan rumah tangga, kewajiban laskar rakyat untuk membantu mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1945 wilayah Jawa Barat termasuk dalam teritorium militer milik Komandemen I TKR yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Didi Kartasmita, Kolonel Abdul Harris Nasution sebagai Kepala Staf, Kapten Mokoginta sebagai ajudan dan beberapa perwira-periwira staf

Adapun 13 Resimen yang dibawah langsung oleh Panglima Komandemen I TKR Jawa Barat menurut Disjarahdam VI/Siliwangi sebagai berikut berikut:

- a. Resimen I Banten: dibawah pimpinan Letnan kolonel Kyai Syam'un;
 - b. Resimen II Bogor: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Husein Sastranegara/Letnan Kolonel Hidayat Sukarmawijaya;
 - c. Resimen III Sukabumi: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Eddi Soekardi;
 - d. Resimen IV Tangerang: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Singgih
 - e. Resimen V Cikampek: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Muffreini;
 - f. Resimen VI Purwakarta: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarna;
 - g. Resimen VII Cirebon: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Supardi;
 - h. Resimen VIII Bandung: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Omon Abdurakhman;
 - i. Resimen IX Padalarang: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Gandawijaya;
 - j. Resimen X Garut: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Ponto Sukawijaya;
 - k. Resimen XI Tasikmalaya: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Soepian Iskanda;
 - l. Resimen XII Jatiwangi: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarmo;
 - m. Resimen XIII Sumedang: dibawah pimpinan Letnan Kolonel Umang Karyasenjaya.
- (Disjarahdam VI/Siliwangi, 1994:31)

Resimen-resimen tersebut dihimpun ke dalam tiga Divisi. Ketiga Divisi tersebut menurut Drs. Yoseph Iskandar cs sebagai berikut:

- a. Divisi I meliputi Keresidenan Banten dan Bogor dengan berkedudukan di Serang, dibawah pimpinan Kyai Haji Syam'un.
- b. Divisi II meliputi Keresidenan Jakarta dan Cirebon berkedudukan di Linggajati dibawah pimpinan Kolonel Asikin, kemudian digantikan oleh Kolonel Abdul Kadir, dan
- c. Divisi III meliputi Keresidenan Priangan berkedudukan di Bandung dibawah pimpinan Kolonel Arudji Kartawinata, kemudian digantikan oleh Kolonel A.H Nasution.
(Iskandar, 2016:20)

Divisi III yang pada awalnya berkedudukan di Priangan dipindahkan ke Tasikmalaya, kemudian pada tanggal 28 Oktober 1945 Pos Komando Divisi III dipindahkan lagi ke Malangbong lalu ke Garut. Perpindahan Pos Komando tersebut kemungkinan besar terjadi karena alasan adanya kepentingan-kepentingan militer saat itu.

Pada Tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dengan singkatan yang sama TKR. Perubahan nama itu sesuai dengan ketetapan Pemerintah No. 2/S.D/1946. Penggunaan nama Tentara Keselamatan Rakyat tersebut tidak berlangsung lama. Pada tanggal 25 Januari 1946, pemerintah Syahrir mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Isi pengumuman lengkap yang ditulis dalam buku siliwangi dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

Kami Presiden Republik Indonesia, setelah mendengar nasehat dari Dewan Kementrian yang berapat di Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 1946, menimbang bahwa dalam saat perjuangan politik negara Republik Indonesia Sekarang mesti diperhatikan kesatuan susuan ketentaran, menetapkan:

1. Nama Tentara Keselamatan Rakyat, dahulu Tentara Keamanan Rakyat, dirobah menjadi Tentara Republik Indonesia
2. Tentara Republik Indonesia adalah satu-satunya organisasi militer negara Republik Indonesia
3. Tentara Republik Indonesia akan disusun atas dasar militer internasional
4. Tentara Keselamatan Rakyat yang sekarang, yang mulai hari pengumuman maklumat ini disebut Tentara Republik Indonesia, akan diperbaiki susunannya atas dasar dan bentuk ketentaraan yang sempurna.
5. Untuk melaksanakan pekerjaan yang disebut dalam fasal 4 maka pemerintah akan diangkat sebuah panitia yang terdiri dari para ahli militer dan ahli yang dianggap perlu.
(Disjarahdam VI/Siliwangi, 1994:33)

Sejak tanggal 25 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat berubah menjadi Tentara Republik Indonesia berdasarkan pada pasal ke empat maklumat tersebut. Perubahan nama tersebut sampai turunnya maklumat pemerintah tertanggal 25 Mei 1946 hanya berupa pergantian nama bukan pergantian isi atau susunan TRI yang sebelumnya bernama TKR.

B. Hasil Penelitian yang Revelan

Penelitian yang relevan merupakan sebuah bentuk penelitian yang pernah dibuat sebelumnya dan dianggap relevan serta memiliki keterkaitan dengan tema, topik, dan judul yang akan diteliti dengan tujuan menghindari pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berdasarkan hasil pencarian tersebut, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul dan topik serta materi penelitian.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Heri Wiyono dari Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, penelitian yang diterbitkan sebagai jurnal penelitian Vol 2, No 1 Maret 2010:66-79 ini berjudul "Pertempuran Convoy Sukabumi-Cianjur 1945-1946."

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peristiwa sejarah pertempuran convoy Sukabumi-Cianjur tahun 1945-1946. Hasil penelitian ini diantaranya pada sidang pertama PPKI yang dilakukan tahun tanggal 18 Agustus 1945, Pemerintah memerintahkan untuk membentuk suatu alat kelengkapan pemerintahan sipil, yaitu KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Pembentukan KNIP dan BKR ini diikuti pula oleh pembentukan KNI dan BKR daerah di tingkat provinsi, keresidenan, kabupaten, kotamadya, bahkan kewedanaan.

Sukabumi yang saat itu masuk dalam keresidenan Bogor turut membentuk Badan Keamanan Rakyat kemudian Badan Keamanan ini berubah nama menjadi TKR dengan diketuai oleh H. Atjun Basuni dan Edi Sukardi, Selain pembentukan BKR kemudian berganti nama dengan TKR, di sekitar Sukabumi bermunculan laskar-laskar perjuangan pemuda. Tercatat ada beberapa badan kelaskaran yang memiliki basis perjuangan dengan kuantitas tinggi diantaranya Hisbullah, PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia), Barisan Banteng Indonesia, Barisan Islam Indonesia (BII), Kelompok bekas tahanan Digul, KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi), Badan Kelaskaran dan Kepolisian.

Jurnal penelitian ini juga menjabarkan peristiwa kedatangan sekutu ke Jawa Barat yang direspon dengan penyerangan-penyerangan oleh Tentara Keamanan Rakyat dan laskar-laskar pemuda di berbagai wilayah, di Sukabumi dan Cianjur penyerangan kepada pasukan konvoi sekutu dan Gurkha dilakukan dengan tujuan menghadang jalur suplai dari Jakarta menuju Bandung atau dari

arah sebaliknya. Pertempuran pun terjadi disepanjang jalan raya Bogor-Sukabumi-Cianjur. Pertempuran di Bojongkokosan menjadi salah satu bukti sejarah perjuangan rakyat Sukabumi-Cianjur dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia dari ancaman Sekutu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Heri Wiyono, Penelitian penulis berfokus pada peran Divisi III Resimen III Tentara Republik Indonesia Jawa Barat dalam pencegahan konvoi sekutu Ciranjang-Cianjur tahun 1946. Sedangkan dalam penelitian Heri Wiyono mendeskripsikan secara umum pertempuran konvoy yang terjadi di Sukabumi-Cianjur (Bojongkokosan) bahkan bila dianalisis kembali, penelitian Heri Wiyono lebih banyak membahas peristiwa pertempuran di Sukabumi daripada pertempuran di wilayah Cianjur.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ficky Ziaul Haque dari Universitas Pendidikan Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2016 berjudul “Peranan Letnan Kolonel Eddie Soekardi Pada Masa Dan Setelah Revolusi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1958.” Tujuan penelitian yang ditulis oleh Ficky ini yaitu untuk mengetahui peranan Letnal Kolonel Eddie Soekardi pada masa dan setelah revolusi kemerdekaan,

Hasil dari penelitian Ficky mencakup biografi Letnal Kolonel Eddi Soekardi, kehidupan Militer di Divisi Siliwangi dan peran beliau dalam pertempuran di Bojongkokosan Sukabumi tahun 1945-1946, Peristiwa Hijrah divisi siliwangi. Perbedaan penelitian Ficky dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, dalam penelitian Ficky lebih menekankan pada

peran sosok Eddi Soekardi dalam masa revolusi kemerdekaan dan pertempuran Bojongkokosan Sukabumi-Cianjur sedangkan dalam penelitian ini mencakup pada peran Divisi III Resimen III Tentara Republik Indonesia Jawa Barat dalam pencegahan konvoi sekutu Cianjur tahun 1946 dan cara menerapkan hasil penelitian ini dalam lingkup Pendidikan

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sofa Fikriyah dari Universitas Negeri Semarang berjudul “Peranan Tentara Keamanan Rakyat Temanggung Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaantahun 1945-1946”. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran Tentara Keamanan Rakyat Temanggung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Hasil dari penelitian Sofa Fikriyah mencakup peran Tentara Keamanan Rakyat Temanggung dalam pelucutan senjata serdadu Jepang pada tahun 1945, kemudian Tentara Keamanan Rakyat Temanggung turut terlibat dalam Pertempuran Palagan Ambarawa. Perbedaan penelitian Sofa Fikriyah dengan penelitian ini yaitu penelitian Sofa Fikriyah meneliti tentang peran Tentara Keamanan Rakyat Tumenggung sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peran Tentara Republik Indonesia Divisi III Resimen III Jawa Barat dalam pencegahan pasukan konvoi .

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar suatu penelitian sangat bermanfaat untuk mengarahkan seorang peneliti dalam proses pencarian sumber, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Pernyataan tersebut

dapat berupa teori atau pendapat dari peneliti. Adapun anggapan dasar dari penelitian ini adalah Divisi III Resimen III Tentara Republik Indonesia (TRI) Jawa Barat turut berperan dalam pencegahan pasukan konvoi sekutu di Cianjur tahun 1946 yang mencoba untuk mengirimkan suplay dari Jakarta menuju Bandung.